



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Berwawasan Sains dan Teknologi Melalui Refleksi Budaya Kemajapahitan”

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pengembangan Desa Mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

Mangihut Siregar¹, Yemy Tristantono²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

email: mangihut@uwks.ac.id

Abstract

An independent village is the dream of all people. To achieve an independent village requires the cooperation of various parties: the village government, the community, the private sector and other parties. An independent village is a reflection of the desire of the community and the government to achieve village progress. The realization of an independent village can provide benefits to the community in the field of economy, public services and village policies. Independent village development is determined by community participation from planning, organizing, implementing to monitoring. The focus of this research is to examine the participation of the people of Sambonggede Village in the political field for independent village development. The method used in this research is a qualitative method. The researcher conducted interviews with the informants who were determined purposively and continued by using the snowball technique. Data were collected by means of observation, interviews, literature study and supplemented with document studies. The results of the study show that the political participation of the community is very decisive in the development of an independent village.

Keywords:

community political participation, independent village, village development

Abstrak

Desa mandiri merupakan idaman semua masyarakat. Untuk mencapai desa mandiri diperlukan kerjasama berbagai pihak: pemerintah desa, masyarakat, swasta dan pihak lainnya. Desa mandiri merupakan cerminan dari keinginan masyarakat bersama pemerintah untuk meraih kemajuan desa. Terwujudnya desa mandiri sehingga memberi manfaat kepada masyarakat di bidang ekonomi, pelayanan umum dan juga kebijakan desa. Pembangunan desa mandiri sangat ditentukan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasannya. Penelitian ini fokus meneliti partisipasi masyarakat Desa Sambonggede dalam bidang politik untuk pengembangan desa mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang ditentukan berdasarkan purposif dan dilanjutkan teknik snowball. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, studi pustaka ditambah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, partisipasi politik masyarakat sangat menentukan dalam pengembangan desa mandiri.

Kata kunci:

partisipasi politik masyarakat, desa mandiri, pembangunan desa



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Berwawasan Sains dan Teknologi Melalui Refleksi Budaya Kemajapahitan”

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara tidak bisa lepas dari pembangunan desa. Desa mempunyai peranan penting dalam pembangunan baik bidang ekonomi, sosial, politik, budaya maupun keamanan. Pembangunan desa seperti yang diutarakan Kartasasmita (1996: 392) merupakan strategi yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Program pembangunan desa dirancang untuk kebutuhan masyarakat tertentu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan itu bukan hanya satu sektor tetapi dilakukan di berbagai sektor mulai dari produksi, pendapatan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Program pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila seluruh unsur masyarakat ikut berpartisipasi. Masyarakat mau berpartisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor: kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan (Tjokroamidjojo: 2005: 226). Partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi sistem politik yang berlaku.

Setiap masyarakat mempunyai partisipasi politik yang berbeda dalam menyampaikan aspirasi. Partisipasi politik tersebut bisa disampaikan secara audiensi ataupun demonstrasi, bisa secara langsung ataupun tidak langsung, bisa juga dengan cara yang legal maupun illegal, juga secara spontan maupun berkesinambungan.

Hal ini tentunya dipengaruhi karakteristik yang dimiliki setiap masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering dijadikan sebagai objek politik. Perilaku ini dapat terjadi menjelang pemilihan umum dan saat pelaksanaan pemilihan umum. Padahal sejatinya masyarakat mempunyai hak untuk dapat berpartisipasi dan dapat menunjukkan eksistensinya dalam berbagai program yang akan dijalankan pemerintah setiap harinya. Masyarakat tidak hanya dinilai sebagai objek politik saja, namun masyarakat harus menjadi subjek atau pelaku politik. Setiap program pemerintah seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat sehingga program itu dapat berjalan dengan baik.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi secara individu maupun kelompok. Partisipasi politik mempunyai peranan yang penting dalam konteks dinamika perpolitikan di pemerintahan. Dengan adanya partisipasi politik oleh masyarakat, maka kepentingan mereka akan dapat terakomodir dan tersampaikan kepada pemerintah. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada partisipasi masyarakat maka kepentingannya juga tidak akan terakomodir. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat menjadi faktor yang penting untuk mewujudkan kepentingan masyarakat secara umum.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Berwawasan Sains dan Teknologi Melalui Refleksi Budaya Kemajapahitan”

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses atau pelaksanaan aktifitas politik. Beberapa contoh dalam partisipasi politik masyarakat adalah saat adanya program serap aspirasi dari pemerintah atau berpartisipasi pada saat adanya pemilihan umum. Hal tersebut merupakan sebagian contoh kecil dalam pelaksanaan partisipasi politik masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa dalam pembangunan desa mempunyai 4 aspek yaitu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa mandiri merupakan sebuah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang mudah, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai IPD atau Indeks Pembangunan Desa lebih dari 75.

Pembangunan desa mandiri tentu harus mengedepankan gotong royong, kebersamaan, serta kekeluargaan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa mandiri memang tidak bisa lepas dari adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Masyarakat harus sadar bahwa dirinya mempunyai hak

untuk dapat berpartisipasi karena suatu desa dapat mandiri jika adanya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya. Masyarakat bisa memberikan masukan atau aspirasi kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai pembangunan yang sangat diperlukan di desa tersebut supaya dapat dimusyawarahkan secara bersama. Sebab BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa (UU No. 6 Tahun 2014).

Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena dapat dijadikan sebagai model desa mandiri terhadap desa-desa yang lain. Desa mandiri merupakan desa dambaan bersama. Desa mandiri dapat tercapai dan semakin berkembang apabila masyarakat umumnya berpartisipasi aktif dalam setiap kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Untuk mengetahui fenomena yang dialami masyarakat, peneliti dapat memperhatikan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain yang dilakukan secara holistik (Moleong, 2014: 5). Objek material penelitian adalah partisipasi politik masyarakat Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban dalam pengembangan desa mandiri.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Berwawasan Sains dan Teknologi Melalui Refleksi Budaya Kemajapahitan”

Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat meliputi: kepala Desa Sambonggede, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengurus BUMDes, dan tokoh agama. Wawancara dipandu dengan daftar pertanyaan pokok. Agar data semakin lengkap, peneliti juga menggunakan data sekunder melalui sumber buku, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Keseluruhan teknik ini dilakukan dengan cara beriringan. Analisis data dilakukan sejak dimulai penelitian dan berakhir setelah laporan penelitian selesai. Setelah dianalisa, kemudian data dinegosiasikan dan disiskusikan dengan para informan. Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu penulisan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Desa Sambonggede menjadi Desa Mandiri

Predikat yang dimiliki Desa Sambonggede sebagai desa mandiri bukanlah secara tiba-tiba atau kebetulan. Keberhasilan meraih desa mandiri merupakan hasil kerja keras pemerintah bersama dengan masyarakat. Keberhasilan Desa Sambonggede dimulai pada tahun 2018 yang dinobatkan menjadi desa percontohan.

Meminjam pendapat Budiono (2015), salah satu cara untuk mempercepat pembangunan di desa ialah dengan pemberian wewenang terhadap pemerintah desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas untuk mengurus daerahnya sendiri. Kewenangan yang dimiliki Desa Sambonggede untuk menciptakan kreatifitas sehingga desanya semakin berkembang.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, Desa Sambonggede mendapat predikat desa mandiri. Predikat ini dapat diraih karena memiliki indeks desa membangun (IDM) sebesar 853. Tingginya IDM yang diraih Desa Sambonggede sehingga layak meraih predikat desa mandiri. IDM diukur melalui berbagai bidang meliputi: dimensi sosial, dimensi ekonomi, sampai dimensi infrastruktur. Akumulasi dari semua dimensi ini menjadi tolok ukur untuk menentukan suatu desa dapat disebut menjadi desa mandiri.

Desa Sambonggede dapat digolongkan sebagai desa mandiri karena desa tersebut sudah dapat berdiri tegak tanpa menggantungkan bantuan dari pemerintah. Desa Sambonggede sudah mampu mengelola anggaran dan belanja desa (APBDes). Salah satu sumber APBDes adalah hasil pendapatan desa sendiri.

Desa sambonggede dapat meraih desa mandiri berdasarkan beberapa kriteria: dimensi sosial, dimensi ekologi, aktifitas desa,

kerjasama desa dan perdesaan, sumber pendapatan desa, aset atau kekayaan desa, total belanja APBDes, dan letak geografinya. Dimensi sosial meliputi kesehatan tentang ketersediaan rumah sakit, rumah sakit bersalin, bidang praktek. Selain bidang kesehatan, bidang sosial mencakup jumlah sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Indikator lain yaitu adanya perpustakaan baca atau taman baca untuk anak-anak. Selain itu adanya fasilitas untuk menjaga keamanan desa, pemukiman yang layak huni, ketersediaan air bersih, akses sanitasi, akses listrik, dan juga akses informasi dan komunikasi.

Aspek yang paling dasar sebagai indikator desa mandiri adalah aspek kebutuhan dasar atau pelayanan dasar. Kebutuhan dasar ini meliputi: penyelenggaraan pendidikan, pemenuhan fasilitas kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Kebutuhan dasar tersebut relatif terpenuhi di Desa Sambonggede. Hal ini dapat dilihat melalui pengembangan pos kesehatan desa atau Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu dan juga pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selain pembangunan fisik, Desa Sambonggede juga melengkapi biaya operasional dalam pelayanan tersebut melalui anggaran dana desa.

2.2 Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Desa Sambonggede

Secara harafiah, partisipasi mempunyai arti ikut serta atau ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan sosial. Politik merupakan proses pembuatan kebijakan (Ranney, 1958:5). Dengan demikian partisipasi politik berarti peran serta masyarakat dalam berbagai proses kebijakan. Partisipasi politik bukanlah hanya berbentuk dukungan terhadap pemimpin tetapi juga keterlibatan dalam segala hal mulai dari proses pembuatan program hingga pelaksanaan keputusan. Apabila hanya berbentuk dukungan terhadap kebijakan pimpinan, itu disebut dengan mobilisasi politik.

Mobilisasi politik bukanlah keinginan dari masyarakat yang melakukannya melainkan keinginan aktor yang membuat mobilisasi tersebut. Meminjam pendapat Karp dan Susan (2007: 217-234), mobilisasi merupakan usaha aktor untuk memengaruhi distribusi kekuasaan pada dua aktor yaitu individu dan partai. Tindakan itu dilakukan dalam 3 proses: proses kepentingan, proses pembentukan komunitas dan proses pemanfaatan instrumen.

Mobilisasi politik oleh Stefano (2007), dibagi dua yaitu, mobilisasi langsung dan tidak langsung. Mobilisasi langsung yaitu pengerahan terhadap pemilih sehingga mau melakukan seperti keinginan aktor yang memobilisasi. Mobilisasi tidak langsung adalah



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Berwawasan Sains dan Teknologi Melalui Refleksi Budaya Kemajapahitan”

pengaruh yang dilakukan seorang aktor sehingga masyarakat mengubah pemikirannya.

Berbeda dengan mobilisasi politik, partisipasi politik bukanlah pengerahan memobilisasi masyarakat sehingga mengikuti keinginan aktor yang memobilisasi. Seperti yang diutarakan Kaelola (2009: 222) partisipasi politik merupakan aktivitas seseorang atau sekelompok orang yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Kegiatan politik yang dimaksud termasuk mengikuti Pemilu, terjun dalam partai politik dan juga memengaruhi pengambilan keputusan. Begitu luasnya cakupan partisipasi politik sehingga sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.

Tingkat partisipasi politik di setiap masyarakat sangatlah berbeda, ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Seperti penelitian yang dilakukan Nurgiansah (2021: 1 - 9) di Kabupaten Sleman dijelaskan, walaupun masa pandemi covid-19, tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Tingkat partisipasi yang tinggi ini dapat diukur melalui angka pemilih sebanyak 549.044 suara, sedangkan yang golput hanya 126 suara.

Sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik sangatlah banyak. Suharyanto (2016: 123-136) dalam penelitiannya yang berjudul “Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat” menunjukkan

bahwa surat kabar merupakan media yang sangat berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat. Semakin banyak masyarakat berlangganan koran, pengetahuan masyarakat terhadap politik semakin baik.

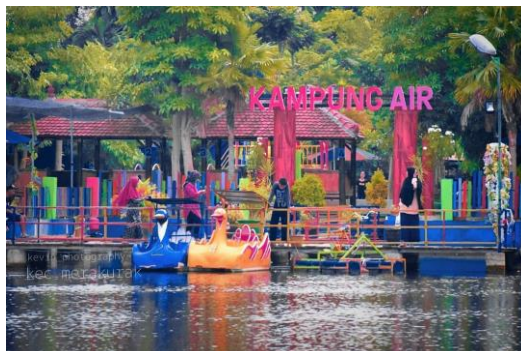
Partisipasi politik di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban relatif baik. Partisipasi ini dapat dilihat melalui perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Tahapan ini dilakukan dengan cara berkelompok dan juga pribadi atau individu. Partisipasi secara berkelompok dilakukan melalui: Karang Taruna, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), PKK, Tim Desa Siaga, Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Bentuk partisipasi politik mereka lakukan melalui musyawarah desa (Musdes).

Pada tahap perencanaan, biasanya pemerintah desa bersama masyarakat selalu melakukan musyawarah desa. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat Desa Sambonggede berhak untuk ikut mengelola unit usaha yang ada di Desa Sambonggede seperti: Kampung Air, pasar desa, dan taman bermain. Sedangkan pada tahap pengawasan, masyarakat dapat memberikan masukan atau kritikan kepada pemerintah desa melalui musyawarah atau langsung datang ke kantor Desa Sambonggede.

Selain berkelompok, bentuk partisipasi politik masyarakat juga

dapat dilakukan secara individu. Contoh partisipasi individu ini yaitu kebebasan memberikan pendapat pada saat mengadakan musyawarah desa (Musdes). Setiap kegiatan baru yang akan dilakukan selalu dimulai dengan musyawarah tingkat desa. Masing-masing individu yang ikut dalam musyawarah berhak memberikan masukan pada saat musyawarah desa. Partisipasi lain yaitu kebebasan setiap individu untuk mempromosikan dan juga melakukan program desa yang sudah disepakati bersama.

Masyarakat Desa Sambonggede berhak dalam penggunaan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Partisipasi ini dengan cara mengunjungi pemandian air yang sudah menjadi salah satu badan usaha milik desa. Untuk meningkatkan pendapatan masing-masing keluarga, masyarakat juga berhak untuk berdagang di area wisata air. Selain berjualan di area ini, masyarakat juga boleh berjualan di pasar desa yang dimiliki Desa Sambonggede.



Gambar: 1
Kampung Air

salah satu BUMDes tempat berjualan masyarakat

Foto: Yemy Tristantono, 2022

Bentuk pengawasan dan evaluasi pembangunan secara individu dapat dilakukan dengan cara langsung datang ke kantor desa. Selain mendatangi kantor desa, setiap masyarakat yang ingin memberi masukan atau kritikan dapat disampaikan melalui group media sosial yang sudah dibentuk. Tujuan pembentukan sarana media ini agar setiap masyarakat yang belum terakomodir pendapatnya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.

2.3 Implikasi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pengembangan Desa Mandiri

Partisipasi politik masyarakat yang terjadi dalam pengembangan desa mandiri di Desa Sambonggede berimplikasi terhadap beberapa sektor: ekonomi, politik, kesehatan, lingkungan dan korupsi. Dari segi ekonomi masyarakat Desa Sambonggede sebanyak 75% berada di kelas menengah ke atas. Tingkat perekonomian yang relatif baik ini dapat diperoleh karena lapangan kerja tersedia dengan cukup. Hal ini dapat dilihat seperti data di bawah ini:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	petani	224
2	nelayan	3
3	buruh tani	7



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Berwawasan Sains dan Teknologi Melalui Refleksi Budaya Kemajapahitan”

4	buruh pabrik	7
5	PNS	68
6	pegawai swasta	272
7	wiraswasta/pedagang	1.169
8	TNI	10
9	Polri	10
10	dokter	2
11	bidan	2
12	perawat	5
	Jumlah	1.779

(Sumber: Data Pemerintah Desa Sambonggede, tahun 2022)

Dari data di atas terlihat dengan jelas bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Sambonggede yang paling banyak adalah pedagang (wiraswasta). Jumlah ini paling banyak disebabkan adanya kampung air yang dijadikan menjadi destinasi wisata. Di lokasi destinasi ini, para warga dapat berjualan. Selain berjualan di destinasi wisata, warga Desa Sambonggede juga banyak berjualan di pasar desa yang dimiliki Desa Sambonggede.

Masyarakat yang masih hidup di kelas menengah ke bawah, pemerintah memberikan bantuan. Setiap bulan masyarakat mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini merupakan program dari Kementerian Sosial. Melalui program ini sehingga kebutuhan dasar masyarakat meningkat. Demikian juga pada masa pandemi covid-19, Pemerintah Desa Sambonggede memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Dalam bidang politik, masyarakat Desa Sambonggede relatif baik. Masyarakat sangat proaktif dalam segala kegiatan yang diprogramkan desa. Masyarakat Desa Sambonggede sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kusmanto (2013: 39-47) yang berjudul: “Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.” Melalui penelitian itu, Kusmanto menyimpulkan bahwa masyarakat berpandangan berpartisipasi dalam politik merupakan pekerjaan yang sia-sia. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa umumnya belum diketahui, maka diperlukan sosialisasi sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang cukup tentang politik.

Demikian juga penelitian yang dilakukan Pusida (2014: 1-6) di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam penelitian tersebut, Pusida menyatakan akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, pemahaman masyarakat yang kurang ditambah sikap apatis tentang pembangunan desa, sehingga partisipasi politik masyarakat di Desa Kuma Selatan rendah. Perilaku masyarakat Desa Kuma Selatan sangat berbeda dengan perilaku masyarakat Desa Sambonggede. Politik bukanlah hal yang langka bagi masyarakat Desa Sambonggede tetapi mereka sangat partisipatif.

Partisipasi politik masyarakat bukan datang secara tiba-tiba



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Berwawasan Sains dan Teknologi Melalui Refleksi Budaya Kemajapahitan”

melainkan melalui proses yang panjang dan mendapat dukungan dari pemimpin. Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Endah (2015: 677-684) yang berjudul: “Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera” menyimpulkan partisipasi masyarakat memerlukan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pemimpin lokal yang membawa perubahan. Partisipasi masyarakat desa merupakan aktualisasi dalam pembangunan desa. Masyarakat Desa Sambonggede berperan aktif dalam bidang politik karena ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa. Adanya peran aktif masyarakat dalam bidang politik sehingga masyarakat Desa Sambonggede menjadi melek politik.

Partisipasi politik masyarakat di Desa Sambonggede bukan hanya berlaku pada saat Pemilu atau Pilkades. Masyarakat sudah terbiasa ingin terlibat dalam setiap proses kebijakan di desa yang berkaitan dengan kehidupan bersama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi dapat mereka lakukan baik secara individu maupun secara berkelompok.

Partisipasi politik yang dilakukan masyarakat Desa Sambonggede juga berimplikasi terhadap korupsi. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan setiap kebijakan di desa yang melibatkan masyarakat sehingga aparatur desa melakukan penggunaan anggaran

Desa Sambonggede dengan hati-hati. Mereka tidak berani lagi melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya dalam penggunaan dana desa. Antikorupsi yang berlaku di Desa Sambonggede sehingga Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) menyematkan desa ini menjadi desa antikorupsi.

Perilaku yang antikorupsi berdampak terhadap kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang kesehatan, desa ini melakukan pengembangan Pos Kesehatan Desa dan pengelolaan Posyandu. Bidang pendidikan, Desa Sambonggede mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pengelolaan dan pembinaan yang dilakukan dalam bidang kesehatan dan pendidikan bukan hanya dalam pembangunan fisik saja tetapi juga biaya operasional. Biaya operasional itu diambil dari anggaran dana desa. Kebijakan ini dapat diberlakukan karena masyarakat Desa Sambonggede aktif dalam partisipasi politik.

Pengelolaan lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh partisipasi politik masyarakat. Sewaktu masyarakat Desa Sambonggede kurang berpartisipasi dalam politik, sampah di wilayah mereka dibuang secara sembarangan. Setelah masyarakat berpartisipasi aktif dalam politik, masyarakat sadar akan kesehatan lingkungan. Seperti terlihat dalam foto di bawah ini:



Gambar: 2

Tempat sampah menjadi Kampung Air
Foto: Yemy Tristantono, 2022

Foto paling atas menunjukkan sampah yang bertebaran di sembarangan tempat. Sebelum masyarakat kurang dilibatkan dalam pembangunan desa, masyarakat tidak peduli akan kebersihan lingkungan. Mereka membuang sampah secara sembarangan. Setelah mereka berpartisipasi dalam politik, masyarakat bersama pemerintah Desa Sambonggede sepakat untuk mengubah tempat sampah menjadi kolam renang yang mereka namai Kampung Air. Kampung air yang tadinya kotor dan bau sekarang sudah bersih dan indah sehingga dijadikan sebagai destinasi wisata.

Partisipasi masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan akan memberikan manfaat bagi masyarakat bersangkutan. Seperti yang dikatakan Hardiyanti (2021: 276-283), melalui partisipasi masyarakat menggunakan kemampuannya untuk membangun

diri dan lingkungannya. Oleh sebab itu partisipasi politik yang dilakukan masyarakat dalam proses pembangunan akan memungkinkan dan juga memandirikan masyarakat itu sendiri.

SIMPULAN

Partisipasi politik sangat menentukan pengembangan desa mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Bentuk partisipasi politik dapat mereka lakukan secara berkelompok dan individu. Secara berkelompok mereka praktikkan melalui Karang Taruna, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), PKK, Tim Desa Siaga, Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan juga Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Secara individu partisipasi politik dapat mereka lakukan secara langsung baik melalui rapat atau datang ke kantor desa. Setiap warga berhak untuk berjualan di pasar desa yang dimiliki Desa Sambonggede dan juga berjualan di Kampung Air yang dijadikan sebagai destinasi wisata. Partisipasi politik mereka lakukan sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Partisipasi politik yang terjadi pada masyarakat Desa Sambonggede berimplikasi ke berbagai sektor. Pada sektor ekonomi, masyarakat Desa Sambonggede umumnya hidup dalam tingkat ekonomi menengah ke atas. Dari segi politik, mereka menjadi melek politik. Tidak ketinggalan dari

segi pendidikan dan kesehatan, Desa Sambonggede menyediakan dana operasional demi pengembangan kesehatan dan pendidikan. Partisipasi politik yang baik menciptakan perilaku antikorupsi sehingga penggunaan anggaran desa menjadi transparan.

Daftar Pustaka

- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.
- Endah, K. (2015). Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1 (4), 677-684.
- Hardiyanti, S, dkk. (2021). Partisipasi Politik dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Lubuk Tenam Jambi. *Jurnal Niara*, 14 (1), 276-283).
- Kaelola, Akbar. (2009). *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Karp, Jeffrey A. and Susan A. Banducci. (2007). Party Mobilization and Political Participation in New and Old Democracies. *Party Politics*, 13 (2), 217-234.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo.
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 1 (1), 39-47.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurgiansah, T.Heru. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*. 6(1), 1-9. DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14994>
- Pusida, R. (2014) . Partisipasi Politik Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Politico*, 3 (2) 1-6.
- Ranney, Austin. (1958). *The Governing of Men: An Introduction to Political Science*. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
- Stefano, B. (2007). *The Political Mobilization of the European Left, 1860-1980: The Class Cleavage*, Digital Printed Version. New York: Cambridge University Press.
- Suharyanto, A. (2016). Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*. 6 (2), 123-136.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Berwawasan Sains dan Teknologi Melalui Refleksi Budaya Kemajapahitan”

Tjokromidjojo, Bintoro. (2005).

Perencanaan Pembangunan.

Jakarta: Mas Agung.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa